

STRATEGI PEMERINTAH TIONGKOK DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN YANG EKSTRIM SEBAGAI TARGET PERTAMA MDGS

Luh Putu Ika Primayanti¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, A.A.B Surya Surya Widya Nugraha³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: primayantiputu@gmail.com¹⁾, idinfasisaka@yahoo.co.id²⁾,
aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

China is a country with high poverty and hunger in the world. Poverty and hunger, the majority occurred in the rural area. Post 2001, the Chinese government's strategy to eradicate poverty and hunger are aligned to achieve the first target of the Millennium Development Goals (MDGs). There are three sub of first target which is referenced achievement such as halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than \$1,25 a day; achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people; and halve, between 1990-2015, the proportion of people who suffer from hunger. This study aimed to describe the Chinese government's strategy to eradicate extreme poverty and hunger to achieve the first target of the MDGs. One of the strategies implemented by the Chinese government is development-oriented poverty reduction program for rural China which is succeeded in making China became the first country to achieve the first target of the MDGs. This study assessed using the concept of food security and poverty reduction.

Key Words : poverty and hunger, China, MDGs, food security, poverty reduction

1. PENDAHULUAN

Tiongkok merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang tinggi di dunia (PBB, 2010). Menurut Gerhard K.Heilig (2005), kemiskinan dan kelaparan yang tinggi di Tiongkok disebabkan oleh beberapa hal diantaranya banyaknya urbanisasi; kurangnya pendidikan; kesulitan akses kesehatan; pola hidup pertanian, *Hukou System* dan pekerja migran. Pemerintah Tiongkok lebih lanjut membagi

kemiskinan menjadi dua jenis. Pertama, *absolute poverty* yang berarti pendapatan perkapita penduduk pertahun kurang dari 625 Yuan. Kedua, *relative poverty* yaitu pendapatan perkapita penduduk pertahun di bawah 865 Yuan.

Berdasarkan *Geographical Information System* (GIS) Tiongkok (2001), kemiskinan dan kelaparan di Tiongkok mayoritas terjadi di daerah pedesaan. Terdapat 26 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim.

Sementara, 76 juta penduduk lainnya berada dalam garis pendapatan rendah yaitu hanya 924 yuan perorang pertahunnya. Pemerintah Tiongkok pun menetapkan “Kabupaten Miskin” yang terdiri dari 592 kabupaten yang tersebar dari Timur Laut ke Barat Daya Tiongkok, 74 kabupaten yang berada di Tibet, dan 9 daerah pedesaan yang sangat kecil yang tergolong miskin.

Kondisi kemiskinan dan kelaparan tersebut membuat pemerintah menjalankan beberapa strategi sebagai upaya untuk mengentaskannya. Pasca tahun 2000, strategi pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan lebih difokuskan pada pencapaian target pertama MDGs. Adapun *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan tujuan pembangunan millenium yang ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di New York, September 2000.

Selanjutnya, menurut United Nation (2000), target pertama MDGs tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,25 perhari dalam kurun waktu 1990-2015. Kedua, mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Ketiga, menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015.

Dalam pencapaiannya, menurut UNDP Tiongkok (2015), Tiongkok menjadi negara berkembang pertama yang berhasil mengentaskan kemiskinan dan kelaparan

yang ekstrim sebagai target pertama dalam MDGs.

Adapun sesuai tabel di atas, target 1A telah berhasil di capai Tiongkok. GDP meningkat dari 10,0 triliun Yuan di tahun 2000 menjadi 63.3 triliun di tahun 2014, hal tersebut membuat Tiongkok menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kinerja yang luar biasa ini telah melahirkan peningkatan pendapatan baik penduduk perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2014, pendapatan kotor per kapita penduduk perkotaan dan pendapatan bersih penduduk pedesaan di Tiongkok mengalami peningkatan 3,59 dan 3,39 kali, masing – masing mencapai 28.844 Yuan dan 9892 Yuan. Menurut kementerian luar negeri Tiongkok (2015), masyarakat miskin terbelakang di Tiongkok berkurang sebanyak 439 juta, dari 689 juta di tahun 1990 menjadi 250 juta di tahun 2011.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menyokong keberlanjutan pengembangan lapangan kerja. Pada tahun 2014, dalam mencapai target 1B, sebanyak 773 juta penduduk Tiongkok telah memiliki pekerjaan, termasuk di dalamnya 393 juta merupakan penduduk perkotaan. Hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat pengangguran sebesar 4,3% selama sepuluh tahun terakhir. Dalam mengentaskan kelaparan sesuai target 1C, selama 15 tahun terakhir, Tiongkok melakukan strategi berkelanjutan untuk memperkuat keseluruhan kapasitas produksi pertanian. Output produk nasional pertanian utama seperti biji-bijian, sayuran dan daging terus berkembang. Secara khusus, kapasitas produksi gabah meningkat substansial seperti kepemilikan

gandum perkapita sebanyak 445 kg pada tahun 2014. Selain pangan, target 1C juga diukur berdasarkan tingkat gizi buruk. Tiongkok pun telah berhasil menurunkan sebanyak 138 juta penduduk bergizi buruk dalam kurun waktu 1990-2014.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka pertama yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari jurnal karya Asiah Hamzah, (2012) berjudul "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia: Realita dan Pembelajaran". Jurnal ini membantu penulis untuk mengetahui pengertian dan dimensi – dimensi kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, dipaparkan pula strategi pemerintah Indonesia untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim demi tercapainya target MDGs yang pertama. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup strategi yang dilakukan. Dalam jurnal tersebut hanya dibahas strategi berupa pembuatan kebijakan yang diimplentasikan hanya dalam ruang lingkup nasional, namun strategi yang dimiliki Tiongkok memuat kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup internasional seperti kerjasama internasional dan bantuan luar negeri. Selain itu, penulis menggunakan konsep *poverty reduction* dan *food security* dalam membahas strategi pemerintah Tiongkok. Berbeda dengan jurnal Asiah Hamzah yang menggunakan konsep dasar kemiskinan dan kelaparan serta *millenium development goals* (MDGs).

Kajian pustaka kedua dalam penelitian ini diambil dari artikel karya Hu

Angang, Hu Linlin dan Chang Zhixiao yang berjudul "*China's economic growth and poverty reduction (1978-2002)*". Artikel tersebut membahas bagaimana strategi pemerintah Tiongkok mengentaskan kemiskinan periode 1978-2002, sehingga Tiongkok berhasil merealisasikan upayanya sejak tahun 1978 dan memberikan kontribusi besar bagi penurunan kemiskinan di dunia.

Terdapat enam strategi sehingga Tiongkok dapat mengentaskan populasi kemiskinan dalam skala besar pada periode tersebut antara lain: (1) Meningkatkan ekonomi yang tinggi secara terus – menerus; (2) Pekerja di daerah pedesaan dialihkan untuk bekerja di bidang industri non pertanian; (3) Mempercepat urbanisasi; (4) Mengimplementasikan kebijakan berorientasi ekspor; (5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (6) Mengimplementasikan aksi anti kemiskinan diadopsi oleh pemerintah.

Perbedaan dengan tulisan penulis adalah pada tahun 2000-2015 strategi pemerintah Tiongkok lebih difokuskan untuk mencapai target pertama MDGs dan mengentaskan kemiskinan khususnya yang terjadi di pedesaan. Sedangkan artikel karya Hu Angang, Hu Linlin dan Chang Zhixiao membahas strategi Tiongkok tahun 1978 – 2002 yang lebih berfokus untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Tiongkok. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas mengenai strategi pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kelaparan, bukan hanya membahas pengentasan kemiskinan.

Sedangkan, persamaan dengan tulisan ini yaitu membahas bagaimana

strategi pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan tingkat kemiskinan. Terdapat beberapa strategi yang masih tetap dilaksanakan pada periode 2000-2015 seperti implementasi kebijakan berbasis ekspor dan sistem pasar terbuka, peningkatan kualitas sumber daya manusia, melaksanakan komitmen aksi anti kemiskinan serta terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1 Kerangka Pemikiran

1. *Food Security*

Menurut *United Nations Trust Fund for Human Security* (2009), *food security* merupakan salah satu bagian dari *human security* yang secara khusus digunakan untuk mengentaskan kelaparan. Lebih lanjut, KTT Pangan Dunia (*World Food Summit*, 1996) mendefinisikan *food security* yaitu "Ketahanan pangan ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat" (Anderson, 2009).

Dari definisi di atas, *Food and Agriculture Organization* (2003) memberikan empat dimensi utama mengenai *food security* yang seyogyanya dipenuhi pemerintah untuk tercapainya pengentasan kelaparan yaitu :

1. *Physical "Availability" of Food* yaitu ketersediaan fisik pangan yang diukur dengan ketersediaan tingkat produksi pangan, tingkat stok dan perdagangan bersih.
2. *Economic and Physical "Access" to Food* yaitu terciptanya akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan. Kekhawatiran

tentang akses pangan telah cukup mengakibatkan fokus kebijakan yang lebih besar pada pendapatan, pengeluaran, pasar dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan.

3. *Food "Utilization"* yaitu adanya pemanfaatan pangan yang dipahami sebagai cara tubuh membuat berbagai nutrisi dalam makanan agar kebutuhan status gizi individu terpenuhi. Pemanfaatan pangan meliputi pemberian makan, persiapan makanan, pengelolaan bahan makanan, keragaman makanan dan distribusi intra rumah tangga makanan.
4. *"Stability" of the Other Three Dimensions Over Time* yaitu asupan makanan yang dimiliki hendaknya berkelanjutan dan stabil. Dalam menciptakan hal tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal yaitu kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, dan faktor ekonomi (pengangguran dan kenaikan harga pangan).

2. *Poverty Reduction*

Poverty reduction merupakan serangkaian langkah – langkah, baik di bidang ekonomi maupun kemanusiaan yang bertujuan untuk mengeluarkan penduduk dari kemiskinan. Menurut Bank Dunia (1990), kemajuan yang pesat dan berkelanjutan secara politik dapat membuat pengentasan kemiskinan tercapai. Adapun strategi yang dibuat oleh negara hendaknya mengandung dua elemen penting. Pertama, mempromosikan penggunaan aset secara produktif oleh pekerja. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang memanfaatkan intensif pasar, institusi sosial dan politik,

infrastruktur dan teknologi. Kedua, pemerintah memberikan pelayanan sosial dasar bagi penduduk miskin misalnya perawatan dasar kesehatan, keluarga berencana, dan khususnya gizi dan pendidikan.

Pedoman pengentasan kemiskinan pun diumumkan oleh *Development Assistance Committee* (DAC) pada tahun 2001. Terdapat lima kemampuan yang harus ditingkatkan dan disediakan oleh negara demi pengentasan kemiskinan. pertama, kemampuan ekonomi Kemampuan untuk mendapatkan penghasilan, untuk konsumsi dan memiliki aset merupakan kunci tercapainya *food security*, kesejahteraan dan status sosial. Aspek ini sering diangkat oleh orang-orang miskin, bersama dengan akses aman ke sumber daya produktif keuangan dan fisik: tanah, alat dan hewan, hutan dan perairan nelayan, kredit dan pekerjaan yang layak. Kedua, kemampuan sumberdaya manusia. Didasarkan pada kesehatan, pendidikan, gizi, air bersih dan tempat tinggal. Hal tersebut merupakan elemen inti dari kesejahteraan serta sarana penting untuk meningkatkan mata pencaharian.

Ketiga, kemampuan protektif. Kemampuan protektif yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan guncangan ekonomi dan eksternal. Ketidakamanan dan kerentanan merupakan dimensi penting dari kemiskinan. Ancaman eksternal misalnya adanya konflik, wabah penyakit, bencana alam, dan krisis ekonomi. Keempat, kemampuan politik. Kemampuan politik termasuk hak asasi manusia, suara pemilih dan pengaruh atas kebijakan publik dan prioritas politik. Kelima, kemampuan

sosial dan budaya. Pemerintah seyogyanya memberikan pelayanan sosial dasar yang memadai bagi masyarakatnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bungin (2007) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun fenomena tertentu. Maka dari itu penelitian ini selanjutnya akan mendeskripsikan strategi pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim untuk mencapai target pertama MDGs.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kemiskinan dan Kelaparan di Pedesaan Tiongkok

Pasca tahun 2000, pemerintah mulai menyadari kemiskinan dan kelaparan di pedesaan merupakan masalah ekonomi dan sosial yang utama. Oleh karena itu pemerintah mulai memprioritaskan peningkatan standar hidup dan peningkatan substansial dari penduduk pedesaan. Menurut Chow (2006), terdapat tiga komponen penting dalam membahas permasalahan kemiskinan dan kelaparan pedesaan di Tiongkok.

Pertama, kesenjangan pendapatan antara penduduk perkotaan dan pedesaan.

pemerintah Tiongkok melihat tolak ukur masalah kemiskinan dan kelaparan di pedesaan berdasarkan memburuknya pendapatan relatif dari penduduk pedesaan terlepas dari peningkatan pesat dalam pendapatan absolut, dan ekspresi ketidakpuasan sosial. Kedua, pelayanan oleh pemerintah pusat yang tidak menguntungkan untuk penduduk pedesaan dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pertama, investasi pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan lebih sedikit daripada di perkotaan. Pembangunan infrastruktur diinvestasikan hanya dalam jumlah terbatas untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kedua, pembangunan kesejahteraan kurang untuk penduduk pedesaan termasuk perawatan kesehatan dan subsidi pendidikan.

Ketiga, pengadaan produk pertanian oleh instansi pemerintah terus berjalan dan harga pengadaan sering ditetapkan di bawah harga pasar. Ketiga, komponen dari masalah kemiskinan di pedesaan adalah bahwa hak-hak para petani telah dilanggar oleh kegiatan ilegal pejabat pemerintah daerah. Menurut *Central Government of China* (2004), contoh yang paling sering terjadi adalah penyitaan tanah dari petani untuk pengembangan infrastruktur sedangkan petani menerima kompensasi yang sewenang-wenang dan jauh di bawah harga pasar.

4.3 Strategi Pemerintah Tiongkok Mengentaskan Kemiskinan dan Kelaparan yang Ekstrem Sebagai Target Pertama MDGs

4.3.1 menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat

pendapatan kurang dari USD 1,25 per hari dalam kurun waktu 1990-2015.

Berikut ini akan dipaparkan empat strategi yang dilakukan Pemerintah Tiongkok untuk mencapai target 1A. Pertama, dari tahun 2000 hingga 2014, pemerintah pusat di Tiongkok mengalokasikan dana 296,6 milyar Yuan sebagai komitmen pentingnya mengentaskan kemiskinan dan menggabungkannya dalam perencanaan ekonomi dan sosial tahunan nasional. Pemerintah pun memberikan alokasi dana dan membuat beberapa strategi dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut *Information Office of the State Council of the People's Republic of China* (2011), salah satu strategi yang diimplementasikan adalah *Development-oriented Poverty Reduction for China's Rural Areas* (2001-2010).

Kedua, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan partisipasi multi-sektor secara menyeluruh baik di pemerintah pusat dan daerah, dengan badan-badan tertentu yang dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan pengentasan kemiskinan. Ketiga, Ketiga, mengembangkan inklusifitas mekanisme pasar dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan orang miskin. Melalui reformasi lembaga dan mekanisme penilaian untuk kabupaten miskin, pengenalan mekanisme pengentasan kemiskinan yang tepat, mengimplementasikan mekanisme bahwa fungsionaris pemerintah untuk tinggal di desa, perbaikan mekanisme untuk mengelola dana, dan inovasi keuangan untuk pengentasan kemiskinan.

Keempat, memobilisasi seluruh masyarakat ke dalam upaya mengentaskan

kemiskinan dimana pemerintah, pasar dan masyarakat berkolaborasi dalam memerangi kemiskinan. Menurut *Ministry of Foreign Affairs People Republic of China* (2015), Pemerintah Tiongkok menjadikan tanggal 17 Oktober sebagai "Hari pengentasan kemiskinan di Tiongkok", dan membangun platform kelembagaan untuk berbagai pihak di masyarakat termasuk perusahaan swasta, lembaga sipil, organisasi nirlaba dan individu untuk berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4.3.2 Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.

Berikut ini akan dipaparkan empat strategi yang dilakukan Pemerintah Tiongkok untuk mencapai target 1B. Pertama, pemerintah berkomitmen bahwa pekerjaan merupakan hal yang penting dan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan proaktif. Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempromosikan pekerjaan, menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih proaktif, dan menciptakan lapangan kerja di seluruh negeri. Selanjutnya, pemerintah membangun lingkungan kelembagaan yang menampilkan kewirausahaan dan inovasi masyarakat, memfasilitasi pertumbuhan dan perluasan usaha kecil dan mikro dan membantu lebih banyak penduduk memulai usaha mereka sendiri.

Kedua, mempercepat pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas tinggi dan terampil dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesempatan

kerja penuh. Menurut *International Labour Organization* (2003), beberapa peluncuran program nasional lainnya pun dilakukan seperti rencana pelatihan teknisi baru, kampanye khusus untuk lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi yang menganggur, dan transfer kerja yang dari kota ke pedesaan ditingkatkan.

Ketiga, mempromosikan pekerjaan dan melibatkan perempuan melalui beberapa jaringan serta menjamin akses yang sama bagi perempuan untuk bekerja sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam UU Promosi Pekerjaan yang mana menjelaskan saat merekrut pekerja, penyedia lapangan pekerjaan tidak boleh menolak perempuan dengan alasan jenis kelamin atau menaikkan persyaratan rekrutmen bagi perempuan. Terdapat pula aturan khusus tentang Perlindungan Pekerja Perempuan yang mengatur tentang bahwa perempuan diterima di seluruh sektor pekerjaan.

Keempat, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan memberdayakan lulusan perguruan tinggi. Pemerintah Tiongkok menciptakan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi, dengan melaksanakan program seperti "Rencana untuk wilayah Barat", "Bekerja di desa", dan "Rencana pada pos khusus sebagai guru pedesaan". Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada lulusan perguruan tinggi untuk memulai bisnis dengan membuat kebijakan komprehensif dalam enam bidang yaitu mempopulerkan pendidikan wirausaha, peningkatan pelatihan kewirausahaan, memfasilitasi layanan pendaftaran usaha terkait, menyalurkan bantuan keuangan, menyediakan situs

operasional untuk memulai bisnis dan meningkatkan pelayanan publik untuk memulai bisnis.

4.3.3 Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.

Berikut ini akan dipaparkan empat strategi yang dilakukan Pemerintah Tiongkok untuk mencapai target 1C. Pertama, merumuskan rencana nasional khusus pada produksi pangan. Pemerintah Tiongkok menciptakan kebijakan seperti Garis Besar Rencana Ketahanan Pangan Nasional jangka menengah dan panjang (2006-2020), yang telah menawarkan jaminan penting untuk memastikan keamanan pangan dan memperbaiki struktur makanan, mengimplementasikan sistem perlindungan yang paling ketat untuk lahan pertanian dan cadangan pangan.

Kedua, memperkuat inovasi dan layanan informasi dalam ilmu pertanian dan teknologi. Pemerintah Tiongkok telah mengatur sejumlah program teknologi seperti Proyek Teknologi Grain Harvest yaitu proyek peningkatan kualitas dan kapasitas produksi pangan. Sejak dari tahun 2008, Departemen Ilmu dan Teknologi telah bekerja dengan departemen lain untuk mempromosikan aplikasi informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dengan menggunakan Spark Sains dan Teknologi 12396, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk peningkatan dari kapasitas produksi pertanian secara keseluruhan.

Ketiga, berupaya meningkatkan tingkat gizi anak. Pemerintah Tiongkok meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, dengan dibuatnya Rencana Aksi Nasional untuk Pengembangan Anak-anak Tiongkok (2001-2010) dan memperkenalkan UU Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak yang di dalamnya berisi serangkaian langkah-langkah intervensi gizi anak seperti program Rumah Sakit Bayi, memulai kampanye untuk menghilangkan anemia pada bayi dan anak-anak, melaksanakan aksi untuk pencegahan defisiensi yodium, fasilitas ditingkatkan di kantin sekolah, memperkenalkan nutrisi makanan, dan meningkat secara bertahap tunjangan makanan.

4.4 *Development-oriented Poverty Reduction Program for Rural China* sebagai Strategi Pemerintah Tiongkok dalam Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan

Menurut Lu (2011), secara khusus, Tiongkok memiliki populasi miskin yang lebih besar di daerah pedesaan. Untuk alasan ini, strategi pengentasan kemiskinan Tiongkok adalah memecahkan masalah kemiskinan di daerah pedesaan.

Pemerintah Tiongkok selalu menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan penting dan tugas dalam pembangunan nasional. Salah satu realisasinya menurut adalah *Development-oriented Poverty Reduction Program for Rural* (2001-2010). Adapun intisari dari program ini adalah mempromosikan harmoni sosial dan stabilitas, keadilan, dan membuat kontribusi untuk pengembangan dan kemajuan hak asasi manusia. Pemerintah menciptakan

komitmen pengentasan kemiskinan menjadi suatu tujuan bersama dan tindakan dari seluruh masyarakat.

4.4.1 Implementasi kebijakan *Development-oriented Poverty Reduction Program for Rural China*

Dalam implementasinya, strategi ini merumuskan dan menerapkan kebijakan serta langkah-langkah yang kondusif untuk pengembangan daerah pedesaan yang miskin. Beberapa kebijakan program ini sebagaimana dipaparkan oleh *Information Office of the State Council of the People's Republic of China* (2011), antara lain :

Pertama, kebijakan pedesaan. Sejak tahun 2000 hingga 2011, pemerintah Tiongkok melakukan strategi koordinasi pembangunan ekonomi dan sosial perkotaan dan pedesaan, dan prinsip-prinsip industri memelihara pertanian, perkotaan mendukung daerah pedesaan, dan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi pedesaan yang komprehensif dan masyarakat untuk menguntungkan semua daerah miskin dan semua miskin di pedesaan.

Kedua, kebijakan regional. Pemerintah Tiongkok mulai melaksanakan strategi pembangunan skala besar wilayah Barat. Dalam dekade terakhir, proyek pemeliharaan air, proyek relokasi tanah pertanian hutan dan proyek eksploitasi sumber daya, seperti yang direncanakan dalam strategi pengembangan wilayah Barat, yang diluncurkan pertama kali di daerah miskin, jika semua kondisi lain yang sama; jalan raya diperpanjang untuk daerah miskin dengan lebih cepat untuk menghubungkan

kabupaten dari daerah miskin dengan wilayah nasional dan provinsi.

Ketiga, sistem jaminan sosial di pedesaan. Memberikan jaminan sosial dasar bagi penduduk miskin adalah cara yang paling mendasar dalam memecahkan permasalahan kemiskinan dan kelaparan. Negara memberikan lima bentuk jaminan dukungan (makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan dan biaya penguburan) untuk manula, yatim piatu, janda atau penduduk pedesaan yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki dukungan keluarga.

Keempat, implementasi yang lebih baik dari kebijakan pengentasan kemiskinan. Keberhasilan kebijakan terletak pada pelaksanaannya. Pemerintah Tiongkok menganggap pembentukan sistem tanggungjawab pekerja dan infrastruktur bangunan instansi terkait sebagai kunci untuk pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan, dan telah mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut.

4.4.2 Program Khusus Penanggulangan Kemiskinan

Menurut *The Ministry of Civil Affair* (2005), pemerintah Tiongkok membuat program khusus pengentasan kemiskinan untuk seluruh penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan seperti di daerah Tengah dan Barat Tiongkok yang memiliki penduduk miskin terbanyak. Seluruhnya mencakup 592 kabupaten di daerah-daerah dalam program utama strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah merumuskan program-program khusus, dana khusus yang

sesuai dan memusatkan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengembangkan industri khusus dan kompetitif, meningkatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kualitas masyarakat di daerah-daerah.

Menurut *Information Office of the State Council of the People's Republic of China* (2011), terdapat delapan program khusus yang diimplementasikan oleh pemerintah Tiongkok. Selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut mengenai program khusus tersebut.

Pertama, pemerintah pusat dan daerah telah terus-menerus menyesuaikan struktur pengeluaran keuangan dan secara bertahap meningkatkan input keuangan ke dalam program pengentasan kemiskinan. Input keuangan meningkat dari 12,75 miliar yuan di 2001 menjadi 34,93 miliar yuan pada tahun 2010, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 11,9 persen, dan masukan akumulatif mencapai 204,38 miliar yuan.

Kedua, menerapkan penanggulangan kemiskinan berorientasi pembangunan yang komprehensif di desa-desa. Sebagai upaya mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan di daerah miskin, menurut *Geographical Information* Tiongkok (2001), pemerintah Tiongkok menunjuk 148 ribu desa miskin secara nasional pada tahun 2001, dan merumuskan program pengentasan kemiskinan untuk setiap desa yang meliputi lahan pertanian dasar, air minum bagi masyarakat dan ternak, jalan, pendapatan penduduk desa miskin, usaha sosial dan daerah lainnya.

Ketiga, penguatan pelatihan tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia

merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan daya saing masyarakat dalam mencari pekerjaan. Sejak tahun 2004, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana total tiga miliar yuan untuk pengentasan kemiskinan untuk Program Dew. Program Dew berfokus pada pelatihan angkatan kerja dari keluarga miskin sehingga mereka dapat mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Program ini menekankan pada pelatihan keterampilan teknis dan teknik pertanian praktis.

Keempat, pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah Tiongkok mengembangkan pendidikan, membantu siswa dari keluarga pedesaan miskin secara ekonomi memperoleh keterampilan yang diperlukan melalui pendidikan kejuruan dan menemukan pekerjaan tetap di kota – kota. Dari tahun 2001 sampai 2010, sebanyak 42,89 juta siswa lulus dari sekolah menengah kejuruan, dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga pedesaan atau keluarga urban miskin. Negara terus-menerus meningkatkan sistem subsidi bagi siswa miskin dalam pendidikan wajib belajar, pendidikan SMA dan perguruan tinggi untuk meringankan beban keuangan pada keluarga miskin.

Kelima, mempromosikan pengentasan kemiskinan dengan industrialisasi. Menggabungkan program seperti promosi komprehensif pengentasan kemiskinan di desa-desa, pengembangan eksperimental dari daerah sekitarnya, bantuan kemiskinan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, dukungan kepada petani miskin, membangun basis industri, mendorong penggunaan peralatan

canggih dan teknologi dalam produksi pertanian dan mengembangkan pedesaan ekonomi koperasi skala. Pemerintah Tiongkok telah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi pengembangan industri di daerah miskin.

Keenam, menerapkan bantuan kerja. Kebijakan kerja-bantuan dimulai pada 1980-an di daerah pedesaan untuk terutama mendukung pembangunan ekonomi di daerah miskin dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala kecil di daerah pedesaan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, termasuk pembangunan jalan di kabupaten, kota-kota dan desa-desa, bekerja irigasi lahan pertanian, proyek air minum bagi masyarakat dan ternak, konstruksi dasar modal lahan pertanian, konstruksi padang rumput, dan perbaikan komprehensif cekungan sungai kecil. Sejak tahun 2001 hingga 2010, lebih dari 55 miliar yuan dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai dana bantuan yang secara efektif terbukti meningkatkan produksi dan kondisi kehidupan di daerah miskin.

Ketujuh, relokasi penduduk miskin dari daerah tidak ramah lingkungan. Pada tahun 2010, pemerintah Tiongkok telah merelokasi 7,7 juta orang miskin kemudian secara efektif meningkatkan perumahan mereka, sistem komunikasi, dan kondisi hidup lainnya. Menurut *International Organization for Migration* (2007), dalam proses memajukan industrialisasi dan urbanisasi, beberapa daerah miskin telah dikombinasikan seperti bantuan relokasi dengan pembangunan taman industri, konversi lahan ke hutan dan padang rumput, migrasi untuk tujuan ekologi, penggabungan desa dan

pencegahan bencana, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut sementara mempromosikan kerja petani miskin di daerah perkotaan dan sektor luar pertanian.

Kedelapan, mengentaskan kemiskinan melalui bantuan keuangan. Kekurangan pendapatan selalu menjadi faktor penting menahan kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat miskin. Menurut Guoliang (2008), sejak tahun 2006, negara telah mencoba program reksadana eksperimental di tiga belas ribu desa miskin, mengalokasikan seratus lima puluh ribu yuan untuk setiap desa dalam mendukung produksi lokal. Pemerintah Tiongkok juga telah melakukan reformasi bunga pinjaman kemiskinan yang mana bantuan dalam upaya untuk membimbing dan menginspirasi lembaga keuangan untuk memberikan lebih banyak pinjaman dengan bunga kecil.

4.3.3 Kerjasama Internasional dan Bantuan Luar Negeri

Menurut UNDP Tiongkok dan IPRCC (2011), Pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk memecahkan masalah kemiskinan dengan upaya sendiri sambil belajar dari konsep negara lain yang sukses dalam perjalanan pengentasan kemiskinan. Salah satu yang dilakukan yaitu kerjasama dalam proyek-proyek pengentasan kemiskinan dengan Bank Dunia, Program Pembangunan PBB (UNDP), Bank Pembangunan Asia dan organisasi internasional lainnya, serta organisasi non-pemerintah di negara-negara lain. Hingga tahun 2015, Tiongkok telah berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan internasional, membantu mengatur pertukaran

informasi internasional dan membuat platform kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2004, pemerintah Tiongkok dengan disponsori oleh Bank Dunia mengadakan Konferensi Global Penanggulangan Kemiskinan di Shanghai. Selain itu, UNDP dan organisasi internasional lainnya mendirikan pusat internasional untuk pengentasan kemiskinan di Tiongkok yaitu *The International Poverty Reduction Centre in China* (IPRCC). IPRCC melakukan beberapa kegiatan seperti program pelatihan untuk mendapatkan pengalaman mengenai kondisi nyata kemiskinan, implementasi kebijakan dan tantangannya di masyarakat; melakukan penelitian untuk mengetahui strategi yang paling tepat di aplikasikan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tertentu; membangun jembatan untuk melakukan komunikasi internasional dalam membahas pengentasan kemiskinan; serta melakukan kerjasama internasional.

Menurut *Task Team on South-South Cooperation* (2011), sejak tahun 2007, pemerintah Tiongkok juga telah menyelenggarakan Tiongkok-ASEAN Forum Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah mempromosikan kerjasama pengentasan kemiskinan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, memfasilitasi proses pengentasan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan daerah, stabilitas dan kemakmuran. Sementara itu, pada tahun 2010, pemerintah Tiongkok menjadi tuan rumah Konferensi pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan Tiongkok-Afrika demi tercapainya target MDGs.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pasca tahun 2000, strategi pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim difokuskan dalam mencapai target pertama MDGs. Strategi pengentasan tersebut diformulasikan dalam bentuk komitmen, program dan kebijakan. Dalam pencapaiannya, Tiongkok menjadi negara berkembang pertama yang berhasil mencapai target pertama MDGs.

Strategi yang dilaksanakan pemerintah Tiongkok dalam mencapai target pertama MDGs yang mana setiap sub target pertama memiliki strategi khusus dalam pencapaiannya. Dalam mencapai target IA, pemerintah Tiongkok memberikan alokasi dana dan membuat beberapa strategi dalam mengentaskan kemiskinan; menyiapkan sistem kebijakan yang sehat untuk dan secara aktif mengembangkan kerjasama dengan berbagai sektor; mengembangkan inklusifitas mekanisme pasar; dan memobilisasi pemerintah, pasar dan masyarakat berkolaborasi dalam memerangi kemiskinan.

Selanjutnya, strategi untuk mencapai target IB yaitu pemerintah berkomitmen bahwa pekerjaan merupakan hal yang penting dan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan proaktif; mempercepat pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas tinggi dan terampil dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja penuh; mempromosikan pekerjaan dan melibatkan perempuan melalui beberapa jaringan serta menjamin akses yang sama bagi perempuan untuk bekerja sesuai hukum yang berlaku; dan mendorong terciptanya

lapangan pekerjaan dan memberdayakan lulusan perguruan tinggi.

Strategi untuk mencapai target 1C antara lain merumuskan rencana nasional khusus pada produksi pangan dan *food security*; memperkuat inovasi dan layanan informasi dalam ilmu pertanian dan teknologi; dan dilakukan serangkaian langkah-langkah intervensi gizi anak seperti meluncurkan program Rumah Sakit Bayi, memulai kampanye untuk menghilangkan anemia pada bayi dan anak-anak, melaksanakan rencana aksi untuk pencegahan defisiensi yodium.

Demi memantapkan pengentasan kemiskinan di pedesaan, pemerintah Tiongkok mengimplementasikan program yaitu *Development-oriented Poverty Reduction Program for Rural Tiongkok*. Program ini terdiri dari beberapa program khusus antara lain penyaluran dana bantuan kemiskinan; menerapkan pengentasan kemiskinan berorientasi pembangunan komprehensif di desa – desa; penguatan pelatihan tenaga kerja; pengentasan kemiskinan melalui pendidikan; mempromosikan industrialisasi; menerapkan bantuan kerja; relokasi penduduk miskin dari daerah tidak ramah lingkungan; mengentaskan kemiskinan dengan bantuan keuangan; serta kerjasama internasional.

2. DAFTAR PUSTAKA

Angang, Hu., Linlin, Hu., & Zhixiao, Chang. 2003. *Tiongkok's economic growth and poverty reduction (1978-2002)*. Diunduh dari www.imf.org/external/np/apd/seminars/2003/newdelhi/angang.pdf

Begum, S. 2011. *Economic growth and child poverty reduction in Bangladesh and China*. Diunduh dari <http://ftp.iza.org/dp5929.pdf>

Braun, J. 1995. *Employment for poverty reduction and food security*. USA: International Food Policy Research Institute

Cammack, P. 2003. *What the world bank means by poverty reduction*. Diunduh dari <http://www.albacharia.ma/xmlui/bitstream/handle/.pdf>

Chow, G. 2006. *Rural Poverty in China: Problem and Policy*. Diunduh dari <https://www.princeton.edu/ceps/workingpapers/134chow.pdf>

Curtis, Mark. 2011. *Country successes in reducing hunger : How they did it, and why other donors and governments should change policy*. Diunduh http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/country_successes_in_reducing_hunger_mark_curtis_nov_2011_0.pdf

Government of China, & FAO. 2008. *National medium-term priority framework (NMTPF)*. Diunduh dari <ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Country%20NMTPF/China/NMTPF%20status/NMTPF%20China%20draft%202009-2013.pdf>

Guoliang, W. 2008. *Retrospect of poverty reduction and development policies in China*. Diunduh dari <http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/40377881.pdf>

Hamzah, A. 2012. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia : realita dan pembelajaran. *Jurnal AKK*, Vol.I(1). Diunduh dari <http://www.e-jurnal.com/2014/11/kebijakan-penanggulangan-kemiskinan-dan.html>

Headey, D. 2013. IFPRI Discussion paper 01303 : *The global landscape of poverty, food insecurity,*

- and malnutrition and implications for agricultural development strategies. Diunduh dari <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.645.6529&rep=rep1&type=pdf>
- Heilig, G., dkk. 2005. *Poverty alleviation in Tiongkok : a lesson for the developing world?*. Diunduh dari http://www.gerhard-k-heilig.com/pdf/Poverty_5.pdf
- Hussain, A. 2003. *Urban poverty in China : measurement, patterns and policies*. Diunduh dari <http://www.ilo.int/public/english/protecton/ses/download/docs/china.pdf>
- Information Office of the State Council of the People's Republic of Tiongkok. 2001. *Development-oriented Poverty Reduction Program for Rural China*. Diunduh dari <http://Tiongkok.org.cn/e-white/fp1015/index.htm>
- Ingutia, A. 2009. *Analysis of the relation between rural poverty, malnutrition and hunger and the interlinks with agricultural production growth and productivity growth with special reference to Mozambique and Bangladesh*. Diunduh dari <http://www.helsinki.fi/taloustiede/Abs/DP32.pdf>
- International Organization for Migration. 2007. *Migration and poverty alleviation in China*. Diunduh dari http://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs_27.pdf
- International Poverty Reduction Centre in China. 2014. *IPRCC annual report 2014*. Diunduh dari https://www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/publications/annual_report_IPCC_2014.PDF
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kanbur, R. 2009. *What determines poverty reduction?*. Diunduh dari <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers/WhatDeterminesPovertyReduction.pdf>
- Mai, Lu. 2011. *Poverty eradication in China : a new phase*. Diunduh dari <http://www.un.org/esa/socdev/csocd/2011/Lu.pdf>
- Mathur, Om. 2013. *Urban poverty in Asia*. Diunduh dari <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/59778/urban-poverty-asia.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs People's Republik of Tiongkok. 2015. *Report in Tiongkok's implementation of the millennium development goals (2000-2015)*. Diunduh dari http://www.cn.undp.org/content/dam/Tiongkok/docs/Publications/UNDP-CH-SSC-MDG2015_English.pdf
- Mas'oe'd, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. *Thematic Guideline on poverty reduction*. Diunduh dari [http://gwwweb.jica.go.jp/km/FSubject1701.nsf/ff4eb182720efa0f49256bc20018fd25/9418e7cbda6f009a492579d4002a2283/\\$FILE/JICA_TG_PovertyReduction_2011.pdf](http://gwwweb.jica.go.jp/km/FSubject1701.nsf/ff4eb182720efa0f49256bc20018fd25/9418e7cbda6f009a492579d4002a2283/$FILE/JICA_TG_PovertyReduction_2011.pdf)
- Pingali, P. 2005. *Eradicating extreme poverty and hunger : toward a coherent policy agenda*. Diunduh dari <http://www.fao.org/3/a-af839t.pdf>
- Pogge, T. 2003. *The first UN millennium development goal : a cause for celebration?*. Diunduh dari <http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms087882.pdf>
- State Council Leading Group. 2003. *International cooperation and poverty alleviation*. Diunduh dari

- <http://conferences.ifpri.org/2020chinaconference/pdf/017International.pdf>
- Task Team on South – South Cooperation. 2011. *The international poverty reduction centre in China (IPRCC) case study*. Diunduh dari http://www.southsouthcases.info/pdf/asia_04.pdf
- United Nation. 2010. *Poverty : the official number*. Diunduh dari <http://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2010/chapter2.pdf>
- United Nation. 2015. *The millennium development goals report*. Diunduh dari [http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20\(July%201\).pdf](http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf)
- United Nation Development Group. 2015. *Thematic papers on the millennium development goals*. Diunduh dari <http://www.un.org/en/development/desa/development-beyond-2015.html>
- United Nation Development Programme. 2011. *Policy study on the challenges and reponses to poverty reduction in China;s new stage*. Diunduh dari <http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-PR-Publications-Policy-Study-onthe-Challenge-Responses-toPR-inChina-Newstage.pdf?download>
- United Nation Development Programme China. 2015. *China, the millennium development goals and the post-2015 development agenda*. Diunduh dari <http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/south-south-cooperation/discussion-paper-on-china--the-millennium-development-goals--and.html>
- United Nations Population Fund & United Nation Development Programme. 2011. *Indicators for monitoring the millenium development goals*. Diunduh dari <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookEnglish.pdf>
- United Nation System in China. 2015. *Report on China's implementaton of the millennium development goals (2000-2015)*. Diunduh dari <https://www.unicef.cn/en/uploadfile/2015/0724/20150724114236419.pdf>
- United Nation Trust Fund for Human Security. 2009. *Human security in theory and practice*. Diunduh dari http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf
- Wood, R. (2014). *Aiding labor: foreign aid and the promotion of labor rights in LDCs*. *Journal of Human Rights* 13(2): 186-204. Diunduh dari http://www.public.asu.edu/~rmwod4/Wood_JHR.pdf
- Yan, D & Hua, F. 2004. *Infrastructure, frowth, and poverty reduction in China*. Diunduh dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/958211468770406497/pdf/307740CHA0Infr1ure01see0also0307591.pdf>
- Zhang, A. 1993. *Poverty alleviation in Tiongkok : commitment, policies and expenditures*. Diunduh dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/amei_zhang_0.pdf
- Zude, X. (-). *Poverty reduction in rural China*. Diunduh dari <https://www.nass.usda.gov/mexsai/Papers/comparingpovertyp.pdf>